

## **ABSTRAK**

Julfan Umalekhoa, **“Implementasi Pasal 6 Ayat 1 Huruf (C) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPR Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Di Kabupaten Kepulauan Sula”** di bimbing oleh Amirudin Umasangadji, S.H., M.H, Salha Marasaoli, S.H., M.H.

Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa, ketentuan kuota 30% sudah di implementasikan oleh KPU Kepulauan Sula sudah sesuai Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada saat proses pencalonan, namun ada beberapa Pemilu 2019. Dikarenakan rata-rata kendala politik yang dihadapi perempuan sula adalah masih kurang maksimalnya Partai Politik dalam melaksanakan dan memperjuangkan kegiatan dan kepentingan bakal calon perempuan, sehingga kegiatan sosialisasi yang menyangkut hak-hak dasar politik perempuan tersebut tidak berjalan efektif, ditambah lagi dengan kontruksi negatif sosial yang masih kuat pada masyarakat kepulauan Sula. Untuk itu partai politik harus berperan aktif untuk mendorong kader partai dari kalangan perempuan untuk lebih giat sering-sering turun menyapa masyarakat khususnya pemilih perempuan di berbagai dapil dan desa.

**Kata Kunci: Meningkatkan, Keterwakilan, Perempuan, Calon Legislatif**

## ABSTRAK

Julfan Umalekhoa, **“Implementasi Pasal 6 Ayat 1 Huruf (C) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPR Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Di Kabupaten Kepulauan Sula”** di bimbing oleh Amirudin Umasangadji, S.H., M.H, Salha Marasaoli, S.H., M.H.

Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa, ketentuan kuota 30% sudah di implementasikan oleh KPU Kepulauan Sula sudah sesuai Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada saat proses pencalonan, namun ada beberapa Pemilu 2019. Dikarenakan rata-rata kendala politik yang dihadapi perempuan sula adalah masih kurang maksimalnya Partai Politik dalam melaksanakan dan memperjuangkan kegiatan dan kepentingan bakal calon perempuan, sehingga kegiatan sosialisasi yang menyangkut hak-hak dasar politik perempuan tersebut tidak berjalan efektif, ditambah lagi dengan kontruksi negatif sosial yang masih kuat pada masyarakat kepulauan Sula. Untuk itu partai politik harus berperan aktif untuk mendorong kader partai dari kalangan perempuan untuk lebih giat sering-sering turun menyapa masyarakat khususnya pemilih perempuan di berbagai dapil dan desa.

*“The results of the study show that the 30% quota provision has been implemented by the Sula Archipelago KPU in accordance with KPU Regulation Number 20 of 2018 concerning the Nomination of Members of the DPR, Provincial DPR and Regency/City DPRD. During the nomination process, however, there were several 2019 elections. Due to the fact that the average political obstacle faced by Sula women was that political parties were still less than optimal in carrying out and fighting for the activities and interests of female candidates, so that the socialization activities concerning women's basic political rights not running effectively, coupled with the negative social construction that is still strong in the people of the Sula islands. For this reason, political parties must play an active role in encouraging party cadres from among women to be more active and often come down to greet the community, especially female voters in various electoral districts and villages”.*

**Kata Kunci: Meningkatkan, Keterwakilan, Perempuan, Calon Legislatif**